



**BKAD  
LUTIM**

Rencana Kerja Perubahan

**RENJA** *Perubahan*  
**2025**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai langkah responsif terhadap dinamika pelaksanaan anggaran semester pertama, guna memastikan target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal, efisien, dan akuntabel di sisa tahun berjalan.

Perubahan ini menitikberatkan pada penajaman target kinerja serta rasionalisasi alokasi anggaran pada program-program strategis, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan keuangan dan pengamanan aset daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara tertib dan memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Perubahan Renja BKAD Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen demi terwujudnya Luwu Timur yang lebih Maju dan Sejahtera.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Malih, 01 Juli 2025

KEPALA BKAD Kab. Luwu Timur



**Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M., CWM**

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 197008142002121006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II    EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	9
BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	22
BAB V    PENUTUP .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta prosedur evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta perubahan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian segera. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk melakukan rasionalisasi anggaran dan penajaman target kinerja akibat adanya kendala teknis dalam penetapan anggaran kas serta mekanisme pengadaan (e-katalog) yang belum optimal pada semester pertama.

Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengakomodasi pergeseran prioritas anggaran dari belanja penunjang ke belanja modal dan pemeliharaan aset yang lebih mendesak, guna memastikan aset daerah terkelola secara akuntabel. Oleh karena itu, Perubahan Renja Tahun 2025 disusun bukan hanya untuk memenuhi kewajiban regulatif, melainkan sebagai langkah strategis mitigasi risiko agar target kinerja utama BKAD, khususnya terkait Opini WTP dan optimalisasi aset, tetap tercapai di akhir tahun anggaran.

Dalam konteks perubahan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan, yang disusun melalui Rencana Kerja (Renja), tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan Renja menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi apakah perubahan diperlukan guna menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, proses perubahan Renja ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa BKAD tetap responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mungkin terjadi. Dalam situasi di mana perkembangan tidak sesuai dengan asumsi awal, atau terdapat kebutuhan mendesak untuk menggunakan saldo anggaran sebelumnya, perubahan Renja memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, BKAD dapat terus mendukung prioritas pembangunan daerah secara optimal, sekaligus menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor [Nomor Perda] Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor [Nomor Perbup] Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Perubahan Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BKAD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BKAD, rencana Kerja BKAD, keterkaitan antara Renja BKAD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BKAD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja BKAD Tahun 2025.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB serta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

## BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BKAD.

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

## BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

# EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk Tahun 2025 dengan realisasi fisik dan keuangan yang dicapai hingga akhir Triwulan II (Juni 2025). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja, mengidentifikasi kendala struktural, serta menilai efisiensi penyerapan anggaran sebagai landasan penyusunan Perubahan Renja.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2025, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BKAD menunjukkan capaian yang masih sangat rendah dan belum memenuhi target ideal semester pertama. Secara agregat, rata-rata capaian kinerja fisik baru mencapai 45,79%, sedangkan realisasi keuangan berada pada angka yang sangat kritis, yaitu 8,94% dari total pagu anggaran.

Rincian capaian kinerja per program adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Capaian Fisik:** 48,86%
- **Realisasi Keuangan:** 13,87%
- **Analisis:** Rendahnya realisasi keuangan pada program ini, khususnya pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Umum, mengindikasikan adanya kendala dalam proses pencairan belanja rutin dan operasional kantor yang belum optimal sesuai jadwal kas.

#### 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- **Capaian Fisik:** 40,50%
- **Realisasi Keuangan:** 7,68%

- **Analisis:** Program ini memiliki serapan anggaran terendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan strategis seperti penyusunan laporan keuangan dan koordinasi anggaran yang realisasi fisiknya sudah berjalan (dokumen tersedia), namun proses administrasi pertanggungjawaban keuangannya mengalami keterlambatan signifikan.

### 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

- **Capaian Fisik:** 46,15%
- **Realisasi Keuangan:** 27,67%
- **Analisis:** Meskipun realisasi keuangan program ini relatif lebih tinggi dibanding program lainnya, angka 27,67% masih di bawah target semesteran. Kendala utama terletak pada pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian aset yang membutuhkan waktu pelaksanaan di lapangan lebih lama dari estimasi awal.

Secara keseluruhan, kesenjangan (gap) yang besar antara realisasi fisik (45,79%) dan keuangan (8,94%) menunjukkan adanya **permasalahan administrasi keuangan** yang serius, di mana kegiatan secara substansi telah dilaksanakan, namun penyerapan anggarannya tertahan. Kondisi ini menjadi dasar utama perlunya dilakukan penyesuaian target kinerja dan realokasi anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2025 agar sisa anggaran dapat terserap optimal di semester kedua.

Rincian lengkap capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
			4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Semua Bidang</b>												
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	96,2	87.751.071.299	25	6.890.139.665	22	5.276.772.634	47	12.166.912.299	48,86%	13,87%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	136.064.200	25	3.744.500	25	33.070.000	50	36.814.500	50,00%	27,06%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	3	64.780.500	-	1.500.000	2	16.865.000	2	18.365.000	66,67%	28,35%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.375.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.062.500	1	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	64.846.200	4	2.244.500	2	16.205.000	6	18.449.500	60,00%	28,45%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	84.935.321.159	25	6.746.506.978	25	5.001.763.420	50	11.748.270.398	50,00%	13,83%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	32	84.618.124.809	32	6.712.626.978	32	4.871.526.020	32	11.584.152.998	100,00%	13,69%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (Dokumen)	4	101.681.800	1	-	1	41.777.900	2	41.777.900	50,00%	41,09%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	43.444.000	1	17.020.000	-	25.750.000	1	42.770.000	100,00%	98,45%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	172.070.550	4	16.860.000	5	62.709.500	9	79.569.500	50,00%	46,24%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	16.776.000	25	2.100.000	25	2.072.000	50	4.172.000	50,00%	24,87%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	16.776.000	1	2.100.000	1	2.072.000	2	4.172.000	50,00%	24,87%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	350.272.650	-	3.000.000	18	28.034.700	18	31.034.700	18,00%	8,86%

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	42.688.250	-	3.000.000	1	12.438.700	1	15.438.700	50,00%	36,17 %
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	375	34.000.400	-	-	135	7.720.000	135	7.720.000	36,00%	22,71 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	273.584.000	-	-	4	7.876.000	4	7.876.000	26,67%	2,88%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	100	402.272.800	25	86.055.486	25	135.892.981	50	221.948.467	50,00%	55,17 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6.950.000	1	1.325.000	1	2.150.000	2	3.475.000	50,00%	50,00 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	23.740.000	1	2.685.000	1	4.905.000	2	7.590.000	50,00%	31,97 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	32.900.000	2	-	1	11.100.000	3	11.100.000	33,33%	33,74 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	144	19.920.000	36	2.340.000	35	5.280.000	71	7.620.000	49,31%	38,25 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	37.800.000	1	5.475.000	1	8.000.000	2	13.475.000	50,00%	35,65 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	280.962.800	3	74.230.486	3	104.457.981	6	178.688.467	50,00%	63,60 %

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD-PD penunjuang yang terpenuhi (%)	100	1.558.136.190	-	-	16	5.826.723	16	5.826.723	16,00%	0,37%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	48	139.400.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	191.540.000	-	-	2	-	2	-	14,29%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	214.000.000	-	-	1	-	1	-	100,00 %	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	1.013.196.190	-	-	3	5.826.723	3	5.826.723	20,00%	0,58%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	229.438.300	25	30.880.004	25	39.707.090	50	70.587.094	50,00%	30,77 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	41.878.300	1	-	1	11.740.900	2	11.740.900	50,00%	28,04 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	128.400.000	3	21.880.004	3	19.966.190	6	41.846.194	50,00%	32,59 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	59.160.000	1	9.000.000	1	8.000.000	2	17.000.000	50,00%	28,74 %
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	122.790.000	19	17.852.697	20	30.405.720	39	48.258.417	39,10%	39,30 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	68.250.000	3	11.722.697	5	13.895.720	8	25.618.417	61,54%	37,54%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55	34.540.000	4	6.130.000	7	6.510.000	11	12.640.000	20,00%	36,60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	50,00%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										97,80%	13,87%
<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
<b>KEUANGAN</b>											
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	100	355.627.132.349	34	24.981.823.001	47	2.330.019.878	41	27.311.842.879	40,50%	7,68%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Waktu penyusunan Rancangan APBD Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	100	1.452.127.449	-	151.019.289	-	214.570.900	-	365.590.189	0,00%	25,18%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	69.327.250	-	3.180.000	-	12.060.500	-	15.240.500	0,00%	21,98%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	65.741.400	-	7.265.000	-	-	-	7.265.000	0,00%	11,05%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	59	16.251.449	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	59	16.522.500	59	7.480.000	-	7.967.000	59	15.447.000	100,00%	93,49%

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	132	18.994.500	12	-	59	5.017.000	71	5.017.000	53,79%	26,41 %
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	802.916.050	-	100.479.289	-	93.460.000	-	193.939.289	0,00%	24,15 %
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5	373.011.750	1	13.759.000	1	49.285.500	2	63.044.500	40,00%	16,90 %
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	25	45.526.250	15	9.971.000	5	22.723.000	20	32.694.000	80,00%	71,81 %
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	4	30.154.800	1	8.885.000	1	16.148.400	2	25.033.400	50,00%	83,02 %
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	236	13.681.500	59	-	59	7.909.500	118	7.909.500	50,00%	57,81 %
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	100	440.925.900	21	39.717.000	25	119.771.500	46	159.488.500	46,00%	36,17 %
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	64.873.350	3	5.075.000	3	49.258.500	6	54.333.500	50,00%	83,75 %

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12	183.760.800	3	20.762.000	3	34.063.000	6	54.825.000	50,00%	29,83 %
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	240	192.291.750	60	13.880.000	60	36.450.000	120	50.330.000	50,00%	26,17 %
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Terkoordinasi dan Terlaksana (Persen)	100	1.021.206.000	95	240.425.500	100	250.338.690	49	490.764.190	48,75%	48,06 %
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	38.963.900	3	5.530.000	3	15.596.000	6	21.126.000	50,00%	54,22 %
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	236	39.963.150	59	9.872.500	59	11.934.500	118	21.807.000	50,00%	54,57 %
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18	282.219.700	4	8.451.000	5	23.392.700	9	31.843.700	50,00%	11,28 %

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	18	135.584.750	5	36.545.000	5	31.954.000	10	68.499.000	55,56%	50,52%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	395.268.000	-	173.882.000	-	107.914.000	-	281.796.000	0,00%	71,29%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	25.693.000	-	6.145.000	-	975.000	-	7.120.000	0,00%	27,71%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60	103.513.500	22	-	-	58.572.490	22	58.572.490	36,67%	56,58%
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat (Persen)	100	352.712.873.000	-	24.550.661.212	100	1.745.338.788	100	26.296.000.000	100,00%	7,46%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	349.212.873.000	-	24.497.161.212	1	1.404.838.788	1	25.902.000.000	33,33%	7,42%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	3.500.000.000	-	53.500.000	-	340.500.000	-	394.000.000	0,00%	11,26%

											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	
											Predikat Kinerja	
											Sangat Rendah	Sangat Rendah
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terkelola Dengan Baik (Persen)	91	930.983.500	17	100.945.590	25	156.614.500	42	257.560.090	46,15%	27,67%
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah Yang Tertata Dengan Baik (Perangkat Daerah)	91	930.983.500	17	100.945.590	25	156.614.500	42	257.560.090	46,15%	27,67%
	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	8.625.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	6.865.000	-	-	1	-	1	-	50,00%	0,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	128.930.950	1	12.770.000	-	50.915.000	1	63.685.000	100,00%	49,39%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	31.687.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	181.533.500	1	2.075.000	-	20.577.500	1	22.652.500	50,00%	12,48%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	466.989.300	1	85.660.590	1	35.442.000	2	121.102.590	50,00%	25,93%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	118	106.352.450	-	440.000	-	49.680.000	-	50.120.000	0,00%	47,13%

					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49,05%	27,67%
					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			444.309.187.148		<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>	<b>45,79%</b>	<b>8,94%</b>

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, serta memperhatikan dinamika perubahan kebijakan nasional dan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang menghambat pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Ketidakakuratan Perencanaan Anggaran Kas (Cash Flow) Terdapat deviasi yang signifikan antara rencana penarikan dana (Anggaran Kas) yang disusun pada awal tahun dengan realisasi kebutuhan riil di setiap sub kegiatan. Hal ini menyebabkan penumpukan tagihan di periode tertentu dan menghambat likuiditas operasional, sehingga realisasi keuangan menjadi tidak linear dengan capaian fisik.
2. Hambatan Struktural dalam Implementasi Pengadaan Digital (E-Katalog) Proses pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk kebutuhan rutin non-konstruksi, mengalami perlambatan akibat kendala teknis pada sistem E-Katalog Lokal. Keterbatasan etalase produk dan kesiapan penyedia lokal menyebabkan realisasi belanja operasional (seperti ATK dan cetakan) menjadi terhambat di semester pertama.
3. Kelemahan Koordinasi Internal dalam Manajemen Kinerja Capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya pada aspek administrasi umum, belum optimal akibat kurang cermatnya penetapan target kinerja triwulanan. Target yang ditetapkan di awal tahun tidak sepenuhnya memperhitungkan beban kerja musiman dan dinamika regulasi, sehingga terjadi kesenjangan antara target administrasi dengan realisasi di lapangan.
4. Isu Strategis Perubahan Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis yang mendasari Perubahan Renja Tahun 2025 adalah: "Percepatan Transformasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Rasionalisasi Anggaran yang Responsif dan Pembentukan Administrasi yang Akuntabel." Isu ini menuntut adanya pergeseran fokus anggaran dari belanja penunjang yang kurang produktif menuju kegiatan substantif yang memiliki daya ungkit terhadap perbaikan opini laporan keuangan dan pengamanan aset daerah.

## **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam Perubahan Tahun 2025, lengkap dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Penyusunan rencana tersebut didasarkan pada permasalahan yang dihadapi hingga Triwulan II serta kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (6-8)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				405.983.632.175,0 0	441.880.651.917,0 0	378.834.961.548,0 0	-27.148.670.627,00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				405.983.632.175,0 0	441.880.651.917,0 0	378.834.961.548,0 0	-27.148.670.627,00
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>				405.983.632.175,0 0	441.880.651.917,0 0	378.834.961.548,0 0	-27.148.670.627,00
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</b>	-	<b>96.2 %</b>	<b>54.474.433.726,00</b>	<b>81.385.201.018,00</b>	<b>81.276.845.699,00</b>	<b>-20.132.628.910,00</b>
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran &amp; evaluasi tepat</i>	-	100 Persen	204.333.500,00	180.991.500,00	136.064.200,00	-68.269.300,00
5.02.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	3 Dokumen	98.007.500,00	86.336.500,00	64.780.500,00	-33.227.000,00
5.02.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	3.705.000,00	3.705.000,00	3.375.000,00	-330.000,00
5.02.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	3.062.500,00	3.062.500,00	3.062.500,00	0,00
5.02.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	10 Laporan	99.558.500,00	87.887.500,00	64.846.200,00	-34.712.300,00

5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</i>	-	100 Persen	51.488.207.276,00	78.173.662.468,00	78.461.095.559,00	26.972.888.283,00
5.02.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	112 Orang/bulan	32 Orang/bulan	51.017.842.726,00	77.788.330.918,00	78.143.899.209,00	27.126.056.483,00
5.02.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	108.574.000,00	108.574.000,00	101.681.800,00	-6.892.200,00
5.02.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	89.429.000,00	66.087.000,00	43.444.000,00	-45.985.000,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	18 Laporan	272.361.550,00	210.670.550,00	172.070.550,00	-100.291.000,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar</i>	-	100 Persen	17.090.000,00	17.090.000,00	16.776.000,00	-314.000,00
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	17.090.000,00	17.090.000,00	16.776.000,00	-314.000,00

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	100 Persen	754.638.050,00	585.535.050,00	350.272.650,00	-404.365.400,00
5.02.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	30 Paket	30 Paket	86.700.000,00	0,00	0,00	-86.700.000,00
5.02.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	60.163.250,00	50.963.250,00	42.688.250,00	-17.475.000,00
5.02.01.2.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	700 Orang	400 Orang	52.125.400,00	34.000.400,00	34.000.400,00	-18.125.000,00
5.02.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							

		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	60 Orang	48 Orang	555.649.400,00	500.571.400,00	273.584.000,00	-282.065.400,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD</i>	-	95 Persen	820.302.400,00	543.971.000,00	402.272.800,00	-418.029.600,00
5.02.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00
5.02.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	12.827.400,00	23.740.000,00	23.740.000,00	10.912.600,00
5.02.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	38.625.000,00	38.625.000,00	32.900.000,00	-5.725.000,00
5.02.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	144 Dokumen	144 Dokumen	18.480.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	1.440.000,00
5.02.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	2 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	37.800.000,00	-4.200.000,00
5.02.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	175 Laporan	175 Laporan	701.420.000,00	412.736.000,00	280.962.800,00	-420.457.200,00

5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi</i>	-	97 Persen	576.390.000,00	1.533.919.000,00	1.558.136.190,00	981.746.190,00
5.02.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel							
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	48 Unit	65.150.000,00	139.400.000,00	139.400.000,00	74.250.000,00
5.02.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	14 Unit	158.240.000,00	190.100.000,00	191.540.000,00	33.300.000,00
5.02.01.2.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	200.000.000,00	214.000.000,00	-86.000.000,00
5.02.01.2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	16 Unit	53.000.000,00	1.004.419.000,00	1.013.196.190,00	960.196.190,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-	100 Persen	265.212.500,00	227.242.000,00	229.438.300,00	-35.774.200,00
5.02.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4 Laporan	4 Laporan	92.652.500,00	54.682.000,00	41.878.300,00	-50.774.200,00
5.02.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	128.400.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00
5.02.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	44.160.000,00	44.160.000,00	59.160.000,00	15.000.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</i>	-	95 Persen	348.260.000,00	122.790.000,00	122.790.000,00	-225.470.000,00
5.02.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit	12 Unit	83.800.000,00	68.250.000,00	68.250.000,00	-15.550.000,00
5.02.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	64 Unit	55 Unit	44.460.000,00	34.540.000,00	34.540.000,00	-9.920.000,00
5.02.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-200.000.000,00
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase laporan keuangan tepat waktu</b>	-	- 100 % %	<b>350.260.604.149,0 0</b>	<b>359.302.460.199,0 0</b>	<b>296.627.132.349,0 0</b>	<b>1.234.151,00</b>
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan anggaran</i>	-	100 %	1.566.673.399,00	1.591.466.449,00	1.452.127.449,00	-114.545.950,00
5.02.02.2.01.000 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
		<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	101.249.250,00	79.269.250,00	69.327.250,00	-31.922.000,00
5.02.02.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							

		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	92.174.400,00	74.783.400,00	65.741.400,00	-26.433.000,00
5.02.02.2.01.000 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
		<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	59 Dokumen	59 Dokumen	17.226.449,00	17.226.449,00	16.251.449,00	-975.000,00
5.02.02.2.01.000 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							
		<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	59 Dokumen	59 Dokumen	19.022.500,00	18.922.500,00	16.522.500,00	-2.500.000,00
5.02.02.2.01.000 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
		<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	71 Dokumen	71 Dokumen	19.094.500,00	18.994.500,00	18.994.500,00	-100.000,00
5.02.02.2.01.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							

		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	641.760.950,00	774.605.050,00	802.916.050,00	161.155.100,00
5.02.02.2.01.000 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	514.756.800,00	487.358.750,00	373.011.750,00	-141.745.050,00
5.02.02.2.01.000 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	25 Dokumen	25 Dokumen	83.808.250,00	54.373.250,00	45.526.250,00	-38.282.000,00
5.02.02.2.01.001 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	57.223.800,00	48.376.800,00	30.154.800,00	-27.069.000,00
5.02.02.2.01.001 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							

		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	236 Orang	236 Orang	20.356.500,00	17.556.500,00	13.681.500,00	-6.675.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase realisasi penerbitan SP2D</i>	-	100 %	711.789.500,00	548.372.500,00	440.925.900,00	-270.863.600,00
5.02.02.2.02.000 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	129.999.950,00	111.886.950,00	64.873.350,00	-65.126.600,00
5.02.02.2.02.000 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	506.789.800,00	210.549.800,00	183.760.800,00	-323.029.000,00
5.02.02.2.02.000 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait							

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	74.999.750,00	225.935.750,00	192.291.750,00	117.292.000,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</i>	-	100 %	1.216.663.250,00	1.239.774.250,00	1.021.206.000,00	-195.457.250,00
5.02.02.2.03.000 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	12 Laporan	12 Laporan	75.934.000,00	75.934.000,00	38.963.900,00	-36.970.100,00
5.02.02.2.03.000 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	236 Dokumen	236 Dokumen	55.425.650,00	55.425.650,00	39.963.150,00	-15.462.500,00
5.02.02.2.03.000 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							

		<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	18 Laporan	18 Laporan	315.109.700,00	309.259.700,00	282.219.700,00	-32.890.000,00
5.02.02.2.03.000 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	18 Laporan	18 Laporan	117.116.400,00	150.131.400,00	135.584.750,00	18.468.350,00
5.02.02.2.03.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	489.154.000,00	464.500.000,00	395.268.000,00	-93.886.000,00
5.02.02.2.03.000 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
		<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.000 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							

		<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	32.164.500,00	32.164.500,00	25.693.000,00	-6.471.500,00
5.02.02.2.03.001 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	320 Orang	320 Orang	131.759.000,00	152.359.000,00	103.513.500,00	-28.245.500,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan</i>	-	100 Persen	346.765.478.000,0 0	355.922.847.000,0 0	293.712.873.000,0 0	-53.052.605.000,00
5.02.02.2.04.000 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	0 Laporan	0 Laporan	343.265.478.000,0 0	352.422.847.000,0 0	290.212.873.000,0 0	-53.052.605.000,00

5.02.02.2.04.000 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase penambahan nilai aset tetap</b>	-	- %	<b>1.248.594.300,00</b>	<b>1.192.990.700,00</b>	<b>930.983.500,00</b>	<b>2.240,00</b>
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase aset perangkat daerah yang terkelola</i>	-	92 %	1.248.594.300,00	1.192.990.700,00	930.983.500,00	-317.610.800,00
5.02.03.2.01.000 1	Penyusunan Standar Harga							
		<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	35.196.900,00	12.060.000,00	8.625.000,00	-26.571.900,00
5.02.03.2.01.000 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	30.682.700,00	15.587.000,00	6.865.000,00	-23.817.700,00

5.02.03.2.01.000 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	3 Laporan	3 Laporan	185.630.950,00	185.630.950,00	128.930.950,00	-56.700.000,00
5.02.03.2.01.000 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	62.974.300,00	62.974.300,00	31.687.300,00	-31.287.000,00
5.02.03.2.01.000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.000 8	Penilaian Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	2 Laporan	2 Laporan	75.114.500,00	81.533.500,00	181.533.500,00	106.419.000,00
5.02.03.2.01.001 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	644.975.500,00	621.185.500,00	466.989.300,00	-177.986.200,00
5.02.03.2.01.001 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	118 Laporan	118 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.001 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.001 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	2 Orang	214.019.450,00	214.019.450,00	106.352.450,00	-107.667.000,00
<b>J U M L A H</b>					<b>405.983.632.175,0 0</b>	<b>441.880.651.917,0 0</b>	<b>378.834.961.548,0 0</b>	<b>21.439.574.990,00</b>

## BAB IV

# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai respon strategis terhadap dinamika pelaksanaan anggaran semester pertama. Dokumen ini memuat penyesuaian target kinerja dan realokasi anggaran yang bertujuan untuk memastikan pencapaian target prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan keuangan dan pengamanan aset daerah.

Dokumen Perubahan Renja ini memiliki fungsi sebagai:

1. Pedoman Operasional: Menjadi acuan bagi seluruh bidang di lingkungan BKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada semester kedua tahun 2025.
2. Instrumen Pengendalian: Menjadi dasar evaluasi dan monitoring kinerja untuk memastikan anggaran terserap secara efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Jembatan Perencanaan: Menjamin keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2025-2029 dengan implementasi tahunan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini sangat bergantung pada komitmen, disiplin, dan sinergi seluruh aparatur BKAD. Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar target-target krusial, seperti mempertahankan Opini WTP dan peningkatan nilai aset daerah, dapat terwujud di akhir tahun anggaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025